Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
Nomor : 560/975/DTK-1/2025
Tanggal : 8 Juli 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH (RENJA-P)

TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS TENAGA KERJA
Jl. Menara No. 3 Rantauprapat
Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara
Telp/Fax : 0624 – 21309

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan RENJA Perubahan tahun Anggaran 2025

Adapun Renja Perubahan ini merupakan Rencana Kerja Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan periode satu tahun anggaran untuk pencapaian indikator sasaran Dinas Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

Kami mencoba menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu, namun kami menyadari dengan segala keterbatasan yang ada sehingga dalam penyusunan ini masih jauh dari harapan, oleh karena itu kami mengharapkan adanya saran, kritik dan petunjuk dalam perbaikan untuk masa yang akan datang

Demikian Renja Perubahan Tahun 2025 ini kami buat, mudah-mudahan dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang ketenagakerjaan tahun 2025.

Rantauprapat, 8 Juli 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LABUHANBATU

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS TENAGA KERJA

ZULKARNAIN SIREGAR, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196707151987121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI TRIWULAN II 6

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD 16

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 18

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

3.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD 21

BAB IV : PENUTUP 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menetapkan tata cara perencanaan pembangunan yang meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dalam kurun waktu 20 tahunan, jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahunan serta Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Perubahan Renja (Renja-P) Perangkat Daerah merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program

kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam penyusunan rancangan Perubahan RKPD tahun 2025. Sehingga penyusunan Perubahan Renja PD dapat dikerjakan sejajar dengan penyusunan rancangan perubahan RKPD, dengan memperhatikan kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD pada tahun berjalan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renja PD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan PD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai pedoman/acuan didalam pelaksanaan/pengendalian perubahan program dan kegiatan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dalam tahun periode 2025 dan bahan penyusunan RKA Perubahan serta sebagai bahan penyusunan RKPD-P Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 adalah memperbaiki arah penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pembinaan ketenagakerjaan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis sehingga hasil pelayanan publik dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan ketenagakerjaan terlaksana dengan baik.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu adalah :

- Untuk menetapkan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.
- Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Sementara (Perubahan KUA-PPAS) tahun 2025.
- Sebagai bahan paparan dalam rangka forum Perangkat Daerah, musrenbang dan bahan penyusunan RKA

Perubahan serta sebagai bahan penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Labuhanbatu.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD Dinas Tenaga Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu merupakan pedoman untuk perubahan rencana tahunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Secara garis besar Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) PD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai Triwulan II
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.2. Issu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

BAB III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV: Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun 2025 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Pada program ini, Realisasi Capaian Kinerja sebesar 56,06% dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.517.163.676,- pada triwulan II atau mendapatkan predikat “rendah” untuk capaian kinerja. Realisasi Capaian ini merupakan hasil dari 6 kegiatan yang masuk pada program penunjang urusan pemerintahahan daerah kabupaten/kota. Tingkat capaian ini sudah sesuai dengan target capaian pada triwulan ke II karena kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program perencanaan tenaga kerja bertujuan untuk memastikan ketersediaan data dan infromasi ketersediaan tentang tenaga kerja serta kebijakan program kegiatan yang dikebutuhan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Program ini mendapatkan predikat "sangat rendah" dengan capaian kinerja sebesar 0% pada triwulan ke-2 karena program ini dihapuskan terkait efisiensi anggaran.

3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang salah satu kegiatan di dalamnya melatih keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi. Capaian kinerja pada triwulan ke-II menunjukkan pencapaian yang "sangat rendah", yaitu untuk rata-rata capaian kinerjanya 0,81%. Rendahnya tingkat Capaian kinerja tersebut disebabkan karena kegiatan pada program pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja akan dilaksanakan pada triwulan ke-III tahun anggaran 2025.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program penempatan tenaga kerja merupakan suatu program yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan setengah penganggur melalui perluasan kesempatan kerja diberbagai bidang usaha dalam menciptakan tenaga kerja mandiri serta tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja daerah. Program penempatan tenaga kerja ini juga menunjukkan pencapaian kinerja yang "rendah" yaitu sebesar 53,69%, sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar Rp.

87.724.000,-. Tingkat capaian ini disebabkan karena beberapa kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan ke-III dan ke-IV.

5. Program Hubungan Industrial

Program hubungan industrial adalah progam dengan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota. Menunjukkan pencapaian realisasi kinerja " sangat rendah." Dimana realisasi capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan ke-II masih 48,27%, sedangkan realisasi anggaran juga masih Rp. 9.563.000,-. Adapun beberapa kegiatan pada program hubungan industrial akan dilaksanakan pada periode Trtiwulan ke III dan IV.

Hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel 2.1 dalam format dibawah ini :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD : Dinas Tenaga Kerja

No	sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra-PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja-PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12		13=6+ 12			14= 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	
		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																		-					
		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								**4.518.819.020**										**1.619.450.676**					
	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tingkat Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 %**	**15.221.470.000**	**92,96 %**	**8.310.192.982**	**90**	**%**	**3.130.028.420**	**26,17 %**	**818.979.592**	**22,31 %**	**698.184.084**					**48,47**	**1.517.163.676**	**70,72 %**	**9.827.356.658**	**71%**	**65%**	Disnaker
1.	**Optimalisasi Kwalitas dan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Sistematika dan Waktu Penyusunan Dokumen**	**100 %**	**34.508.900**	**99,92 %**	**14.518.900**	**100**	**%**	**6.774.000**	**18 %**	**1.200.000**	**8,86 %**	**600.000**					**35,71**	**1.800.000**	**67,82 %**	**16.318.900**	**68%**	**47%**	Disnaker
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dok	3.150.000	2	Dok	600.000	1 Dok	300.000	- dok	-					50	300.000	6 Dok	3.450.000			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3 Dok	2.232.000	1	Dok	600.000	- dok	-	- dok	-					0	-	3 Dok	2.232.000			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			3 Dok	2.227.500	1	Dok	1.374.000	- dok	-	- dok	-					0	-	3 Dok	2.227.500			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			3 Dok	2.170.000	1	Dok	1.200.000	1 dok	600.000	1 dok	600.000					100	1.200.000	4 Dok	3.370.000			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			3 Dok	2.237.400	1	Dok	2.400.000	- dok	-	- dok	-					0	-	3 Dok	2.237.400			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			13 Dok	780.000	3	Lap	300.000	3 Lap	300.000	- dok	-					100	300.000	16 Lap	1.080.000			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8 Lap	1.722.000	4	Lap	300.000	- Lap	-	- Lap	-					0	-	8 Lap	1.722.000			

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**	95 %	**12.462.788.100**	**98,42 %**	**6.751.551.698**	**100**	**%**	**2.525.117.363**	**28,13 %**	**710.408.669**	**21,77 %**	**549.672.107**					**96,97**	**1.260.080.776**	**97,69 %**	**8.011.632.474**	**103%**	**64%**	Disnaker
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			88 Org	6.591.701.698	22	Org	2.470.117.363	20 Org	703.968.669	20 Org	532.402.107					90,91	1.236.370.776	108 Org	7.828.072.474			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			156 Dok	158.020.000	4	Dok	54.400.000	4 Dok	6.440.000	4 Dok	16.670.000					100	23.110.000	164 Dok	181.130.000			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4 Lap	1.830.000	1	Lap	600.000	- Lap	-	1 Lap	600.000					100	600.000	4 Lap	2.430.000			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian**	**100 %**	**463.144.000**	**102,6 %**	**183.568.800**	**100**	**%**	**25.778.000**	**0**	-	**0**	**-**					**0**	**-**	**51,30 %**	**183.568.800**	**51%**	**40%**	Disnaker
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			2 pkt	21.240.000	1	Pkt	0	0 Pkt	0	0 Pkt	0					0	-	2 pkt	21.240.000			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			36 org	162.328.800	8	Org	25.778.000	- Org	-	- Org	-					0	-	36 Org	162.328.800			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**1.074.490.000**	**99,84 %**	**703.456.141**	**100**	**%**	**276.214.207**	**16 %**	**44.004.750**	**22,50 %**	**62.147.376**					**78,57**	**106.152.126**	**89,21 %**	**809.608.267**	**89%**	**75%**	Disnaker
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4 pkt	7.153.750	1	Pkt	3.040.625	1 Pkt	751.250	1 Pkt	767.500					100	1.518.750	5 Pkt	8.672.500			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor			2 pkt	9.300.000	1	Pkt	84.352.600	- Pkt	-	- Pkt	-					0	-	2 Pkt	9.300.000			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			14 pkt	157.234.200	5	Pkt	64.638.582	5 Pkt	18.900.700	5 Pkt	13.661.700					100	32.562.400	19 Pkt	189.796.600			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			8 pkt	73.663.100	2	Pkt	37.652.400	2 Pkt	5.807.800	2 Pkt	8.798.600					100	14.606.400	10 Pkt	88.269.500			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			45 Dok	39.000.000	12	Dok	9.000.000	12 Dok	9.000.000	- Dok	-					100	9.000.000	57 Dok	48.000.000			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			526 Lap	417.105.091	70	Lap	77.530.000	30 Lap	9.545.000	20 Lap	38.919.576					71,43	48.464.576	576 Lap	465.569.667			

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100 %**	**758.997.500**	**99,72 %**	**469.594.981**	**100**	**%**	**194.597.450**	**22 %**	**42.235.173**	**21,76 %**	**42.345.601**					**50**	**84.580.774**	**74,86 %**	**554.175.755**	**75%**	**73%**	Disnaker
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat			42 Lap	7.820.000	12	Lap	3.900.000	3 Lap	900.000	3 Lap	900.000					50	1.800.000	48 Lap	9.620.000			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			42 Lap	67.163.351	12	Lap	45.900.000	3 Lap	6.666.138	3 Lap	6.776.566					50	13.442.704	48 Lap	80.606.055			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			44 Lap	394.611.630	12	Lap	144.797.450	3 Lap	34.669.035	3 Lap	34.669.035					50	69.338.070	50 Lap	463.949.700			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dan layak pakai**	**85 %**	**265.041.500**	**100 %**	**187.502.462**	**100**	**%**	**101.547.400**	**21 %**	**21.131.000**	**42,76 %**	**43.419.000**					**90**	**64.550.000**	**95,00 %**	**252.052.462**	**112%**	**95%**	Disnaker
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			4 Unit	121.706.192	1	Unit	45.505.800	1 Unit	18.203.000	1 Unit	6.518.000					100	24.721.000	5 Unit	146.427.192			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			17 Unit	52.941.270	3	Unit	11.159.600	3 Unit	1.508.000	3 Unit	2.091.000					100	3.599.000	20 Unit	56.540.270			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25 Unit	9.315.000	3	Unit	10.830.000	1 Unit	1.420.000	1 Unit	1.400.000					100	2.820.000	27 Unit	12.135.000			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Kantor			0 Unit	-	2		32.832.000	-	-	2 Unit	32.800.000					100	32.800.000		32.800.000			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			14 Unit	3.540.000	2	Unit	1.220.000	- Unit	-	1 Unit	610.000					50	610.000	14 Unit	4.150.000			
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	**56,06**	**1.517.163.676**			**82,96%**	**66%**	
																		Predikat kinerja	**Rendah**				**Tinggi**	**Rendah**	

	2	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Terencananya Ketenagakerjaan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**							**0**	**0**	**0**			**0%**	**0%**	
2.	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM	**Kegiatan: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Persentase Dokumen Perencanaan yang Terpenuhi dan Terevaluasi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**								**0**	**0**					
		Sub kegiatan: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	**0**	**0**	0	0	0	**Dok**	0	0	Dok	0	0	Dok	0								0	0					
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	**0**	**0**			**0%**	**0%**	
																						Predikat kinerja	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

	3	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja yang Dilatih dan Produktif**	**75 %**	**2.632.530.000**	**99,98 %**	**921.552.500**			**205.000.000**	**2,44 %**		**5.000.000**	**-**	**%**	**0**						**2,44**	**5.000.000**	**51,21 %**		**926.552.500**	**68%**	**35%**	Disnaker
3.	Meningkatkan Keterampilan/ Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase pencari kerja yang bersertifikat Kompetensi**	**100 %**	**2.522.402.000**	**99,95 %**	**905.452.000**	**128**	**Org**	**205.000.000**	**2,44 %**		**5.000.000**	**0,00**	**%**	**-**						**2,44**	**5.000.000**	**51,19 %**		**910.452.000**	**51%**	**36%**	Disnaker
		Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2025			352 Org	905.452.000	128	Org	205.000.000	0 Org		5.000.000	0	Org	-						0	5.000.000	352 Org		910.452.000			
		Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Cakupan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Melakukan Kegiatan Sesuai Standar**	**52 %**	**110.128.000**	55 %	**16.100.500**	**0**	**%**	**-**	**- %**		**-**	**-**	**%**	**-**						**0,00**	**-**	**28 %**		**16.100.500**	**53%**	**15%**	Disnaker
		Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			30	16.100.500	0	Lem-baga	0	- Lem-baga		-	-	Lem-baga	-						0	-	30	Lem-baga	16.100.500			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,81**	**5.000.000**			**52,04%**	**25,36%**	
																						Predikat kinerja	**Sangat Rendah**				**Rendah**	**Sangat Rendah**	

	4	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan/ Difasilitasi**	**36 %**	**915.205.000**	**90 %**	**316.459.800**	**35 %**	**252.253.600**	**56 %**	**87.724.000**	**60,0 %**	**-**					**34,78**	**87.724.000**	**62,39 %**	**404.183.800**	**173%**	**44%**	Disnaker
4.	Meningkatkan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	**Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan**	**27 %**	**635.784.000**	**66,35 %**	**119.090.000**	**35 %**	**252.253.600**	**5 %**	**87.724.000**	**36,0 %**	**-**					**34,78**	**87.724.000**	**50,56 %**	**206.814.000**	**187%**	**33%**	
		Sub Kegiatan: Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			0 org	-	180 Org	88.033.600	180 Org	87.724.000	- Org	-					180	87.724.000	180 Org	87.724.000			
		Sub Kegiatan : Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			200 org	119.090.000	80 Org	164.220.000	0 Org	0	0 Org	0					0,00	-	200 Org	119.090.000			
		Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Cakupan Pencari Kerja yang Mendapatkan Informasi Bursa Tenaga Kerja**	**84 %**	**279.421.000**	**100 %**	**197.369.800**	**0 %**	**-**	**- %**	**-**	**- %**	**-**					**0**	**-**	**50,00 %**	**197.369.800**	**60%**	**71%**	
		Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja			500 org	197.369.800	0 Org	0	Org	-	Org	-					0	-	500 Org	197.369.800			
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	**53,69**	**87.724.000**			**123%**	**52%**	
																	Predikat kinerja	**Rendah**				**Sangat Tinggi**	**Rendah**	

	5	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan**	**30 %**	**167.263.000**	**117,42 %**	**679.694.500**	**25**	**%**	**931.537.000**	**24,49 %**	**9.563.000**	**24,49 %**	**-**					**44,82**	**9.563.000**	**162,24 %**	**689.257.500**	**540,8%**	**412%**	**Disnaker**
5.	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja	**Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)**	**2,5 %**	**237.610.000**	**377,4 %**	**117.853.000**	**2,4**	**%**	**25.417.000**	**13,87 %**	**3.600.000**	**13,87 %**	**-**					**13,87**	**3.600.000**	**391,2678 %**	**121.453.000**	**15651%**	**51%**	**Disnaker**
		Sub kegiatan : Penyelenggaran Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		36.227.000	17 lap	117.853.000	5	Lap.	25.417.000	5 Lap.	3.600.000	- Lap.	-					100,00	3.600.000	22 Lap.	121.453.000			

	Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Kondusif	**Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan**	**67 %**	**598.705.000**	**40,10 %**	**561.841.500**	**67**	**%**	**906.120.000**	**20,05 %**	**5.963.000**	**30,95 %**	**-**					**30,95**	**5.963.000**	**35,53 %**	**567.804.500**	**53,02%**	**95%**	**Disnaker**
		Sub Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Per-kara		99 Per-kara	191.388.000	40	Per-kara	0	- Per-kara	-	- Per-kara	-					0	-	99 Per-kara	191.388.000			
		Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Per-kara	8.843.000	171 Per-kara	24.973.000	40	Per-kara	10.200.000	27 Per-kara	2.363.000	- Per-kara	-					67,50	2.363.000	198 Per-kara	27.336.000			
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi/SP	9.900.000	64 Asosiasi	17.700.000	45	Asosiasi/SP	3.600.000	9 Asosiasi/SP	3.600.000	- Asosiasi/SP	-					100,00	3.600.000	73 Asosiasi/SP	21.300.000			

		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina			-	-	0	Lembaga	0	- lembaga	-	- lembaga	-					0,00	-			-		
		Sub Kegiatan : Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Org		1.500 org	327.780.500	5800	Org	892.320.000	- Org	-	- Org	-					0,00	-	1.500	Org	-			
																			48,27	9.563.000			9.563.000	**7852%**	**72,98%**	
																			Sangat Rendah					**Sangat Tinggi**	**Sedang**	
																				1.668.934.569						
										4.518.819.020										**1.619.450.676**						
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	**35,84**						
																			Predikat kinerja	**Sangat Rendah**						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu sebagai lembaga teknis bidang ketenagakerjaan dituntut untuk mampu berperan dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang ketenagakerjaan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 pengganti Peraturan Bupati 21 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas - dinas daerah Kabupaten Labuhanbatu. Sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya derajat kesejahteraan bagi Pekerja/Buruh untuk mencapai visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu merupakan strategi pada tingkat kebijakan yang dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan selama pelaksanaan otonomi daerah. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pembangunan bidang ketenagakerjaan daerah di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan.

Rencana sasaran yang ingin dicapai dalam periode Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja yang Terdidik dan Produktif.
2. Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja.

3. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap pernyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	7		9	9	10		11
1	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi			55%	60%	65%	70 %	100%	100%	50%	67%	
2	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan			32%	33%	34%	35 %	51,61%	39,07 %	30,2 9%	35%	
3	Besaran Jumlah			51%	53%	55%	57	15,57%	79,32	73,2	73,50	

	Pekerja / Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek						%		%	2%		
4	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)			60%	62%	65%	67 %	55,56%	32,73 %	50,8 8%	65%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Pemerintah terkait dengan mengatasi masalah pengangguran dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dimasa yang akan datang sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Adapun beberapa isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

a. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2024 mencapai 5,90%. Jumlah Pengangguran sebanyak 14.596 orang (Laki-laki 5.310 Orang dan Perempuan 9.286 Orang). Hal ini salah satunya disebabkan masih rendahnya daya serap tenaga kerja khususnya pada sector formal. Persentase pencari kerja yang ditempatkan pada triwulan ke-II sebesar 36%. Rendahnya tingkat penempatan ini disebabkan

oleh Sedikitnya lapangan kerja tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pencari kerja. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja karena terbatasnya institusi pelatihan kerja berpengaruh pada rendahnya daya serap tenaga kerja, kemudian terbatasnya informasi pasar kerja baik di dalam dan luar negeri juga dapat mempengaruhi terhadap rendahnya daya serap tenaga kerja.

b. Kondisi hubungan industrial telah terlaksana secara harmonis walaupun masih tetap ada perselisihan hubungan industrial. Sampai dengan triwulan ke 2 jumlah perselisihan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja sebanyak 42 kasus. Sebanyak 13 kasus diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) atau sekitar 30,95%. Hal tersebut yang disebabkan Masih adanya perbedaan pemahaman dan penafsiran antara pekerja dan pengusaha tentang peraturan ketenagakejraan dan isi perjanjian kerja bersama (PKB).
c. Masih banyaknya Jumlah Pekerja /Buruh yang belum menjadi Peserta Program Jamsostek yang disebabkan rendahnya tingkat kesadaran Pengusaha/ kurangnya kemampuan Pengusaha dalam memenuhi segala kewajiban perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya pada skala usaha kecil.

2.3.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKP Tahun 2025 antara Target dan realisasi Sasaran Daerah pada Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebagai berikut. Target awal RKPD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 sebesar 5,50%, sedangkan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 berdasarkan

data Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanabtu sebesar 5,90 persen.

Tabel 2.3.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

No	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	Target
1.	Meningkatkan sumber daya manusia dengan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk semua (Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing)	- Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	5,50 %

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut.

Tabel 2.3.2 Keterkaitan Program Dinas Tenaga Kerja Kab. Labuhanbatu Thn. 2025 dengan Prioritas Rkpd Kabupaten Labuhanbatu Thn. 2025

No	Prioritas RanWal RKPD	Program Dinas Tenaga Kerja
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanan Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan yang dirumuskan terdiri dari program prioritas yang menggambarkan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu.

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1.5 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
    - 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   2.1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
   3.1 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
   3.2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
4. Program Hubungan Industrial
   4.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   4.2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu disajikan pada tabel 3.1 dibawah ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. LABUHANBATU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA							**5,765,895,480.00**	**4,546,267,413.00**	**4,518,819,020.00**	**-1,247,076,460.00**							**4,630,091,405.00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5,765,895,480.00**	**4,546,267,413.00**	**4,518,819,020.00**	**-1,247,076,460.00**							**4,630,091,405.00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5,765,895,480.00**	**4,546,267,413.00**	**4,518,819,020.00**	**-1,247,076,460.00**							**4,630,091,405.00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**				**90 %**	**90 %**	**3,122,249,430.00**	**3,011,188,613.00**	**3,130,028,420.00**	**-16,857,175.00**							**3,105,392,255.00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat Pemenuhan Sistematika dan Waktu Penyusunan Dokumen*				100 %	100 %	3,600,000.00	4,800,000.00	6,774,000.00	3,174,000.00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi		3,780,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			630,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			630,000.00	DINAS TENAGA KERJA

	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600,000.00	600,000.00	1,374,000.00	774,000.00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			630,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	600,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			630,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600,000.00	1,200,000.00	2,400,000.00	1,800,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			630,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			315,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			315,000.00	DINAS TENAGA KERJA

	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan*				90 %	90 %	2,467,522,664.00	2,271,332,472.00	2,525,117,363.00	57,594,699.00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Pegawai Negeri Sipil		2,306,624,500.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2,416,912,664.00	2,216,332,472.00	2,470,117,363.00	53,204,699.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			2,250,302,500.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	50,010,000.00	54,400,000.00	54,400,000.00	4,390,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			55,692,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			630,000.00	DINAS TENAGA KERJA

	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Rasio ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				100 % 24 %	100 % 24 %	81,191,000.00	81,892,400.00	25,778,000.00	-55,413,000.00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	ASN (PNS dan Non PNS)		93,566,130.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	16,800,000.00	16,682,400.00	0.00	-16,800,000.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			26,274,780.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	4 Orang	64,391,000.00	65,210,000.00	25,778,000.00	-38,613,000.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			67,291,350.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	316,562,866.00	355,698,891.00	276,214,207.00	-40,348,659.00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	-		395,501,890.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,302,500.00	3,040,625.00	3,040,625.00	-261,875.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			3,192,650.00	DINAS TENAGA KERJA

	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	46,474,166.00	84,352,600.00	84,352,600.00	37,878,434.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			88,570,230.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	61,787,500.00	76,380,466.00	64,638,582.00	2,851,082.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			78,939,480.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	26,270,700.00	40,570,200.00	37,652,400.00	11,381,700.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			43,858,700.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			9,450,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	169,728,000.00	142,355,000.00	77,530,000.00	-92,198,000.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			171,490,830.00	DINAS TENAGA KERJA

	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran*				100 %	100 %	178,507,450.00	200,297,450.00	194,597,450.00	16,090,000.00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	ASN (PNS dan Non PNS)		201,765,300.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3,000,000.00	3,600,000.00	3,900,000.00	900,000.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			3,780,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36,710,000.00	45,900,000.00	45,900,000.00	9,190,000.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			39,648,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	138,797,450.00	150,797,450.00	144,797,450.00	6,000,000.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			158,337,300.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah Kondisi Baik dan Layak Pakai*				80 %	80 %	74,865,450.00	97,167,400.00	101,547,400.00	26,681,950.00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Barang Milik Daerah		104,154,435.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36,024,650.00	45,505,800.00	45,505,800.00	9,481,150.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			47,781,090.00	DINAS TENAGA KERJA

	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	11,340,800.00	11,159,600.00	11,159,600.00	-181,200.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			13,846,245.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	5,760,000.00	6,450,000.00	10,830,000.00	5,070,000.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			6,772,500.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20,520,000.00	32,832,000.00	32,832,000.00	12,312,000.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			34,473,600.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	4 Unit	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			1,281,000.00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Terencananya Ketenagakerjaan**				**100 %**	**100 %**	**55,263,500.00**	**58,763,500.00**	**0.00**	**3,500,000.00**							**58,763,500.00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Persentase Dokumen Perencanaan yang Terpenuhi dan Terevaluasi*				100 % 1dokumen undefined	100 % 1dokumen undefined	55,263,500.00	58,763,500.00	0.00	-55,263,500.00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Tenaga Kerja		58,763,500.00	DINAS TENAGA KERJA

	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	0 Dokumen	55,263,500.00	58,763,500.00	0.00	-55,263,500.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			58,763,500.00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	-				-	-	**2,200,000,000.00**	**241,517,000.00**	**205,000,000.00**	**-1,958,483,000.00**							**241,517,000.00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Besaran Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi*				64 Orang	64 Orang	2,168,994,500.00	210,000,000.00	205,000,000.00	-1,963,994,500.00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Pencari Kerja (Pengangguran/Setengah Penganggur)		210,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				64 Orang	64 Orang	2,168,994,500.00	210,000,000.00	205,000,000.00	-1,963,994,500.00	Kab. Labuhan batu, Rantau Utara, Siringo-Ringo	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			210,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Cakupan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Melakukan Kegiatan Sesuai Standar*				51 %	51 %	31,005,500.00	31,517,000.00	0.00	-31,005,500.00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		31,517,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				38 Lembaga	30 Lembaga	31,005,500.00	31,517,000.00	0.00	-31,005,500.00	Kab. Labuhan batu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			31,517,000.00	DINAS TENAGA KERJA

4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan/ Difasilitasi**				**35 %**	**35 %**	**156,087,950.00**	**448,181,100.00**	**252,253,600.00**	**235,559,550.00**							**391,647,500.00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja*				20 Orang	20 Orang	106,074,450.00	323,569,100.00	252,253,600.00	146,179,150.00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Pencari Kerja		267,035,500.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				60 Orang	60 Orang	29,999,200.00	88,033,600.00	88,033,600.00	58,034,400.00	Kab. Labuhan batu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			31,500,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				20 Orang	80 Orang	76,075,250.00	235,535,500.00	164,220,000.00	88,144,750.00	Kab. Labuhan batu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			235,535,500.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Cakupan Pencari Kerja yang Mendapatkan Informasi Bursa Tenaga Kerja*				83 %	83 %	50,013,500.00	124,612,000.00	0.00	-50,013,500.00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Pencari Kerja		124,612,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				50 Orang	50 Orang	50,013,500.00	124,612,000.00	0.00	-50,013,500.00	Kab. Labuhan batu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			124,612,000.00	DINAS TENAGA KERJA

5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Tingkat Capaian Kinerja Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB. LKS Bipartit. Struktur Skala Upah. dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)**				**25 %**	**25 %**	**232,294,600.00**	**786,617,200.00**	**931,537,000.00**	**600,476,550.00**							**832,771,150.00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*				2.4 %	2.4 %	15,000,000.00	21,800,000.00	25,417,000.00	10,417,000.00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Tenaga Kerja, Perusahaan dan Serikat Pekerja		21,800,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				5 Laporan	5 Laporan	15,000,000.00	21,800,000.00	25,417,000.00	10,417,000.00	Kab. Labuhan batu, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah			21,800,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan*				64 %	64 %	217,294,600.00	764,817,200.00	906,120,000.00	688,825,400.00			-	3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah 3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah	Tenaga Kerja, Perusahaan dan Serikat Pekerja		810,971,150.00	DINAS TENAGA KERJA

BAB IV
P E N U T U P

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka proses pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 tidak lepas dari ketidak sempurnaan oleh karena itu dibutuhkan masukan dan saran yang mendukung untuk kemajuan bersama.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 disusun dan atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.